



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 26 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 5 TAHUN
2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasi tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang, pelaksana pemungut retribusi pasar, pelaksana pemungut retribusi terminal, pelaksana penjaga pintu perlintasan kereta api, pelaksana penjaga repeater, pelaksana pemungut retribusi parkir serta perubahan tambahan penghasilan Kepala Unit Pengelola Pasar, Pengguna Anggaran Kecamatan, Kuasa Pengguna Anggaran Kecamatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan, Bendahara Pengeluaran Kecamatan, Pengurus/penyimpan Barang Kecamatan, Sekretaris Desa, Pengguna Anggaran Kelurahan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Kelurahan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kelurahan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Kelurahan, Bendahara Pengeluaran Kelurahan, dan Pengurus/penyimpan Barang Kelurahan, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Pengasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Pengasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

Ketentuan pada Lampiran V diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 - 9 - 2013

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

| PAPAR IRAPKI | |
|--------------|----|
| Kasi | Ay |
| Kabid | M |
| Sekda | g |
| Kadin | 4 |
| Sekda | m |

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

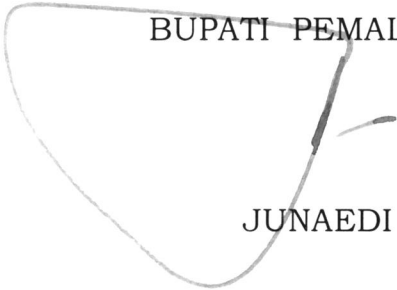
| NO | URAIAN | BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (RUPIAH/BLN) |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang | Rp 15.000.000,00 |
| 2. | Asisten Sekda kabupaten Pemalang | Rp 4.500.000,00 |
| 3. | Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang | Rp 4.500.000,00 |
| 4. | Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang | Rp 4.500.000,00 |
| 5. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang | Rp 4.500.000,00 |
| 6. | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang | Rp 4.500.000,00 |
| 7. | Inspektur Kabupaten Pemalang | Rp 4.500.000,00 |
| 8. | Staf Ahli Bupati Pemalang | Rp 3.000.000,00 |
| 9. | Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang | Rp 1.750.000,00 |
| 10. | Kepala Pelaksana Harian (KALAKHAR) BPBD | Rp 1.750.000,00 |
| 11. | Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang | Rp 1.500.000,00 |
| 12. | Sekretaris/Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang | Rp 1.500.000,00 |
| 13. | Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang | Rp 1.500.000,00 |
| 14. | Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang | Rp 1.500.000,00 |
| 15. | Sekretaris/Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Pemalang | Rp 1.500.000,00 |
| 16. | Sekretaris/Kepala Bidang bukan Pengguna/Kuasa Anggaran | Rp 500.000,00 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|------------------|
| 17. | Kasubag pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang | Rp 800.000,00 |
| 18. | Kasubag pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang | Rp 800.000,00 |
| 19. | Kasubag/Kasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang | Rp 800.000,00 |
| 20. | Kasubag/Kasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang | Rp 800.000,00 |
| 21. | Kasubag/Kasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang | Rp 800.000,00 |
| 22. | Kasubag/Kasi pada Inspektorat Kabupaten Pemalang | Rp 800.000,00 |
| 23. | Kasubag/Kasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang | Rp 800.000,00 |
| 24. | Kasubag/Kasi pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang | Rp 800.000,00 |
| 25. | Kasubag/Kasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang | Rp 800.000,00 |
| 26. | Kepala Unit Pengelola Pasar Kabupaten Pemalang | Rp 200.000,00 |
| 27. | Auditor/ P2UPD | |
| | ➤ Golongan IV | Rp 1.500.000,00 |
| | ➤ Golongan III | Rp 600.000,00 |
| | ➤ Golongan II | Rp 400.000,00 |
| 28. | Pengguna Anggaran (Eselon II) | Rp 2.000.000,00 |
| 29. | Pengguna Anggaran (Eselon III) | Rp 1.500.000,00 |
| 30. | Pengguna Anggaran (Camat) | Rp. 2.000.000,00 |
| 31. | Pengguna Anggaran (Eselon IV) | Rp 1.000.000,00 |
| 32. | Kuasa Pengguna Anggaran | Rp 800.000,00 |
| 33. | Kuasa Pengguna Anggaran (Sekcam) | Rp 1.000.000,00 |
| 34. | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | Rp 200.000,00 |
| 35. | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Kecamatan/Kelurahan) | Rp 300.000,00 |
| 36. | Pejabat Penatausahaan Keuangan | Rp 300.000,00 |

| | | | |
|-----|--|----|------------|
| 37. | Pejabat Penatausahaan Keuangan (Kecamatan/Kelurahan) | Rp | 400.000,00 |
| 38. | Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan | Rp | 175.000,00 |
| 39. | Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Kecamatan/Kelurahan) | Rp | 250.000,00 |
| 40. | Bendahara Penerima | Rp | 175.000,00 |
| 41. | Bendahara Pengeluaran | Rp | 200.000,00 |
| 42. | Bendahara Pengeluaran (Kecamatan/Kelurahan) | Rp | 300.000,00 |
| 43. | Bendahara Penerima Pembantu | Rp | 125.000,00 |
| 44. | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Rp | 125.000,00 |
| 45. | Pembantu Bendahara | Rp | 125.000,00 |
| 46. | Pengurus/ Penyimpan Barang | Rp | 125.000,00 |
| 47. | Pengurus/ Penyimpan Barang (Kecamatan/Kelurahan) | Rp | 200.000,00 |
| 48. | Sekretaris Desa | Rp | 200.000,00 |
| 49. | Pelaksana pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang | Rp | 250.000,00 |
| 50. | Pelaksana pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang | Rp | 250.000,00 |
| 51. | Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang | Rp | 250.000,00 |
| 52. | Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang | Rp | 250.000,00 |
| 53. | Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Pemalang | Rp | 250.000,00 |
| 54. | Pelaksana pada Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang | Rp | 250.000,00 |
| 55. | Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang | Rp | 250.000,00 |
| 56. | Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang | Rp | 250.000,00 |
| 57. | Tenaga Paramedis di Desa terpencil | Rp | 200.000,00 |
| 58. | Tenaga Pendidik di Desa Terpencil | Rp | 200.000,00 |
| 59. | Pelaksana Pemadam Kebakaran | Rp | 200.000,00 |
| 60. | Pelaksana Pemungut Retribusi Pasar | Rp | 200.000,00 |
| 61. | Pelaksana Pemungut Retribusi Terminal | Rp | 200.000,00 |
| 62. | Pelaksana Pemungut Retribusi Parkir | Rp | 200.000,00 |
| 63. | Pelaksana Penjaga Pintu Perlintasan Kereta | Rp | 200.000,00 |

| | | | |
|-----|--|----|--------------|
| | Api | | |
| 64. | Pelaksana Penjaga Repiater | Rp | 200.000,00 ✓ |
| 65. | PNS dengan Kategori baik, rata-rata nilai minimal DP3 sama dengan tahun sebelumnya dan/atau penilaian lainnya. | Rp | 100.000,00 |

| PARAF HIRARKI | |
|---------------|-----------|
| Kasi | <i>Am</i> |
| Kabid | <i>m</i> |
| Sekdin | <i>f</i> |
| Kadin | <i>A</i> |
| Sekda | <i>pu</i> |

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI